

## PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Cok Istri Krisnanda Widani<sup>1</sup>  
Ni Made Adi Erawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: cokrisnanda@gmail.com/ telp: +62 82 111 491 921

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kapasitas fiskal daerah (dengan parameter PAD, DAU, DBH) dan pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM di Kab/Kota Provinsi Bali. Penelitian mencakup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2008-2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (keseluruhan populasi digunakan sebagai sampel). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM, sedangkan DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

**Kata kunci:** PAD, DAU, DBH, PED, IPM

### ABSTRACT

*This study aims to identify, analyze and obtain empirical evidence about the influence of local fiscal capacity (with the PAD parameter, DAU, DBH) and local economic growth in the HDI in the district/ city of Bali province. The research covers eight counties and one city in the province of Bali within the period of observation 2008-2013. The sample used in this study is saturated samples (whole population is used as a sample). This study used secondary data obtained from the Finance Bureau and Badan Bali Provincial Bureau of Statistics. Data analysis techniques used include: classical assumption test, test the coefficient of determination, the F test and t test. The test results indicate that the PAD and DAU and no significant negative effect on the HDI, whereas DBH is positive but not significant effect on the HDI, and the Regional Economic Growth positive and significant impact on the HDI District/City of Bali Province.*

**Keywords:** PAD, DAU, DBH, PED, IPM

### PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru mulai bulan Januari 2001, sejalan dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur

tentang transformasi tata pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi. Kedua UU yang lebih dikenal sebagai UU Otonomi Daerah ini menjadi landasan dalam penentuan kebijakan mengenai pembagian urusan pemerintahan dan masalah desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Kusnandar & Siswantoro (2012) dalam Sugiardi (2014) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. Masih dalam Sugiardi (2014), Lin & Liu (2000) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Kapasitas Fiskal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Unsur Kapasitas Fiskal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 dari sisi Penerimaan Anggaran Pendapatan adalah : Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengindikasikan daerah diberi kewenangan atau otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak terkecuali dalam mengatur masalah keuangan atau finansial (Paujiah, 2012). Tingkat dari kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kualitas

pelayanan publik semaik baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat.

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Daerah. Selain itu, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yaitu menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010). Kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penerapan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi-konsekuensi, yaitu di setiap daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, namun tidak semua daerah mampu membiayai pengeluaran pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2006). Hal tersebut mengakibatkan tidak

meratanya pembangunan di setiap daerah. Untuk mengatasi adanya ketimpangan infrastruktur yang terdapat di setiap daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu bangsa, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu Negara. Mirza (2012) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia, salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non fisik penduduk. Dimana kualitas fisik dapat dilihat melalui angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik dapat terlihat dari lamanya penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan (IPM 2006-2007). Kinerja pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan manusia memiliki peran

tersendiri dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Analisis APBD 2012 secara agregat mengatakan provinsi yang mempunyai rasio pajak tertinggi adalah Provinsi Bali, tingginya rasio pajak ini karena penerimaan pajak daerah di provinsi, kabupaten dan kota se-provinsi Bali cukup besar. Kontribusi utama penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali adalah dari sektor industri pariwisata. Sementara itu, provinsi yang memiliki rasio pajak paling rendah adalah Provinsi Papua. Dilihat dari aspek pajak per kapita secara keseluruhan, Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki rasio pajak per kapita tertinggi, yang berarti setiap penduduk yang ada di Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan penerimaan daerah berupa Pajak Daerah. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rasio pajak per kapita terendah dari 33 provinsi di Indonesia (Analisis APBD, 2012)

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali hingga 2013 adalah sebesar 74,11. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,62 dari tahun 2012, dimana Provinsi Bali

memperoleh nilai IPM sebesar 73,49. Namun jika dilihat lebih seksama peningkatan IPM Provinsi Bali cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2010, dimana peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2009 ke 2010 sebesar 0,76 sedangkan peningkatan IPM Provinsi Bali tahun 2012 ke 2013 sebesar 0,62. Selain itu jika dibandingkan dari tahun ke tahun, peningkatan IPM Provinsi Bali juga tidak konsisten. Hal ini mengindikasikan penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Upaya meningkatkan IPM tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apalagi di era desentralisasi seperti sekarang ini, adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (UU Nomor 32 Tahun 2004), mengindikasikan bawah daerah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan dsentralisasi diharapkan mampu meningkatkan IPM.

Desentralisasi memiliki banyak manfaat yang dapat diberikan untuk pemerintah daerah. Seperti yang dinyatakan Sasana (2009) dan Jumadi *et al.* (2013) yang mengatakan bahwa manfaat desentralisasi fiskal adalah untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi dalam penyediaan layanan publik, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan mobilitas dana. Ini dikarenakan

pemerintah daerah lebih tahu apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat daerah daripada pusat sehingga akan lebih efisien. Selain itu, manfaat lain dari desentralisasi fiskal adalah mendorong pemerintah daerah untuk menjadi inovatif dan memiliki akuntabilitas bagi warga dan penduduknya. Hal ini didukung oleh Tiebout (1956) yang mengemukakan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka.

Wahyu (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Silpa Pada Indeks Pembangunan Manusia Daerah/Kabupaten Kota Provinsi Bali menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan PAD dan DAU terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terbukti berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Harahap (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil yaitu secara parsial DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pendanaan yang bersumber dari daerah sangat ditentukan pada kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pembangunan suatu daerah yang dilakukan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menuntut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah (Pamudi, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini berarti besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012).

Tingkat dari suatu kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Tujuan utama pembangunan daerah selain kemandirian fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Pamudi, 2008).

PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pamudi (2008), Setyowati dan Suparwati (2012), dan Lugastoro (2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

$H_1$  : PAD berpengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali

Wertianti (2013) mengemukakan bahwa DAU adalah pendapatan daerah selain PAD, yang merupakan dana transfer dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Diterimanya DAU, berarti adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Diperolehnya sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dengan bijak untuk membiayai belanja daerah, khususnya sektor publik. Melalui peningkatan fasilitas publik dan infrastruktur publik tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil pula (Setyowati dan Suparwati, 2012).

DAU memiliki peran yang penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan kata lain DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Diterimanya DAU oleh pemerintah daerah berarti daerah memiliki dana tambahan yang dapat digunakan untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Setyowati dan Suparwati (2012), yang mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan Pemaparan tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan yaitu:

H<sub>2</sub> : DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM di Provinsi Bali.

Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants* seperti DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (*earmarking*). Tambunan (2001) menyatakan bahwa alokasi Dana bagi Hasil adalah salah satu instrument untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Jika DBH yang diterima kurang memadai, Pemerintah Pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai perimbangan keuangan daerah supaya dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. ( Tatot

Hendrasto,2001). Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, khususnya belanja langsung sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (Carol,2005).

H<sub>3</sub> : DBH berpengaruh positif dan signifikan pada IPM

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto dalam Mailendra (2009) “*social development is economic development*”. Menurut Todaro (1998), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Mirza (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran

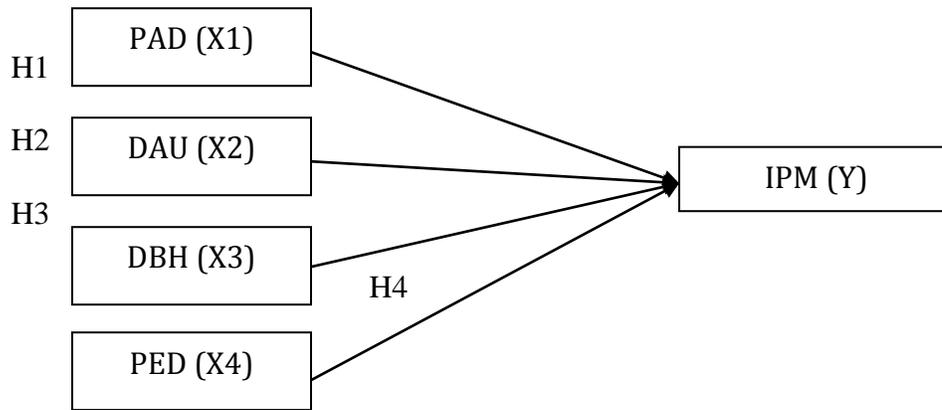
pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

H<sub>4</sub> : Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan pada IPM

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:13). Rahyuda, dkk. (2004:17) mengatakan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Obyek penelitian ini adalah kapasitas fiskal daerah dengan parameter PAD, DAU dan DBH, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan di Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sementara ruang lingkup dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

*Sumber:* data sekunder diolah, (2015)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2010:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah IPM. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait dengan banyaknya faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata – rata lama sekolah.

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,2010:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kapasitas Fiskal Daerah yang diukur dengan parameter PAD, DAU, DBH dan PED. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). PAD yang menjadi fokus penelitian ini adalah PAD tahun 2008-2013.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang menjadi fokus penelitian ini adalah DAU tahun 2008-2013. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat pada laporan realisasi APBD tahun 2008-2013 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali seperti Laporan Realisasi APBD Tahun 2008-2013 dan Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008-2013 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:62). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013 dan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali tahun 2008-2013. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh. Sugiyono (2010:122) menyatakan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-perilaku berupa studi dokumen yang dipublikasi oleh Badan Pusat statistik (BPS), Setda dan Bappeda Provinsi Bali, serta hasil penelitian terdahulu dan buku-buku yang mendukung argumentasi dari hasil penelitian ini.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki kontribusi residual yang normal atau mendekati normal (Utama,2009:89). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Jika tidak normal maka akan dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama dapat dilakukan dengan melihat normal *probability plot*, jika titik-titik meyebar mendekati garis diagonal maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Kedua, dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov, apabila sig (2-tailed) lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila sig (2-tailed) lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara data pada masa sebelumnya (t-1) dengan data sesudahnya (t1). Model uji yang baik adalah terbebas autokorelasi. Deteksi autokorelasi digunakan uji *Run Test*. Deteksi autokorelasi dilihat dari nilai Asymp. Sig yang dihasilkan. Jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari alpha ( $\alpha = 0,05$ ) maka model uji terbebas dari autokorelasi (Gozhali, 2006:104).

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Utama, 2009:94). Pengujian

ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogeny (Utama, 2009:94). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresi nilai *absolute residual* dari model yang diestimasi terhadap variabel bebas, jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap *absolute residual* atau nilai signifikansinya lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas, transformasi data dalam bentuk logaritma sering mampu mengurangi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:145).

Uji kesesuaian model bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan atau tidak. Langkah – langkah dalam uji kesesuaian model (uji F) adalah (1) Menentukan taraf nyata sebesar 5%. (2) Menentukan besarnya *p-value* yang diperoleh dari hasil pengujian dalam program SPSS. (3) Bila *p-value* dari  $F \geq \alpha$  sebesar 5%, maka artinya model penelitian ini tidak layak untuk digunakan. (4) Bila *p-value* dari  $F < \alpha$  sebesar 5%, maka artinya model penelitian ini layak untuk digunakan.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Koefisien

determinasi dilihat melalui nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Setiap tambahan satu variabel independen, maka *R<sup>2</sup>* pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011:97).

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dan variabel moderasi secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya adalah (1)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika *p-value* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  (*p-value* > 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. (2)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika *p-value* lebih kecil sama dengan  $\alpha = 0,05$  (*p-value* < 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel moderasi mampu memoderasi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Besarnya amatan adalah 47 yang diperoleh dari data keuangan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Deskripsi statistik data penelitian adalah seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	St. Deviation
PAD	47	12655751193	1406298099449	181346959575,2	263585636804,83
DAU	47	157052376000	687697696000	401581798510,7	113574897596,56
DBH	47	16878855939	148634014820	46337008787,32	38283763707,085
PED	47	984129	6962611	2894055,87	1688574,695
IPM	47	65,46	79,41	72,4687	3,33403
Valid N (listwise)	47				

Sumber: DataDiolah, 2015

Variabel PAD memiliki nilai terendah 12.655.751.193 dan nilai tertinggi sebesar 1.406.298.099.449 dengan rata – rata sebesar 181.346.959.575,2. Variabel DAU memiliki nilai terendah 157.052.376.000 dan nilai tertinggi sebesar 687.697.696.000 dengan rata – rata 401.581.798.510,7. Variabel DBH memiliki nilai terendah 16.878.855.939 dan nilai tertinggi sebesar 148.634.014.820 dengan rata – rata 46.337.008.787,32. Variabel PED memiliki nilai terendah 984.129 dan nilai tertinggi sebesar 6.962.611 dengan rata – rata 2.894.055,87. Variabel IPM memiliki nilai teendah 65,46 dan nilai tertinggi sebesar 79,41 dengan rata – rata 72,4687.

Penelitian ini mencakup 9 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Penelitian ini menggunakan data *time series*, yang digunakan selama periode 2008 hingga 2013. Jumlah data dalam sebanyak 47 amatan.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai residual.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parametersb	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,28741716
Most Extreme Differences	Absolute	0,140
	Positive	0,076
	Negative	-0,140
Kolmogorov-Smirnov Z		0,961
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,314

Sumber: Data Diolah, 2015

Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai Sig. (2 – tailed) sebesar 0,314 dalam One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari 0,05 ( $> 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Ini berarti bahwa data yang diuji menyebar normal / terdistribusi normal.

Uji autokorelasi dilakukan untuk melacak adanya korelasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Hasil pengujian autokorelasi disajikan dalam Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed)  $> 0,05$  yaitu sebesar 1,000 yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

		Unstandadized Residual
Test Value		4,17107 <sup>b</sup>
Cases < Test Value		46
Cases $\geq$ Test Value		1
Total Cases		47
Number of Runs		3
Z		0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

Sumber: Data Diolah, 2015

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi yang dibuat dilihat berdasarkan matriks korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistic		
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	68,174	1,480			
	PAD	-2,2E-012	0,000	-0,172	0,338	2,962
	DAU	-9,3E-014	0,000	-0,003	0,574	1,741
	DBH	1,39E-011	0,000	0,160	0,205	4,879
	PDRB	1,41E-006	0,000	0,714	0,142	7,040

*Sumber:* Data Diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel PAD adalah 0,338 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 2,962 ( $< 10$ ). Nilai *tolerance* untuk variabel DAU adalah 0,574 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 1,741 ( $< 10$ ). Nilai *tolerance* untuk variabel DBH adalah 0,205 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 4,879 ( $< 10$ ). Nilai *tolerance* untuk variabel PED adalah 0,142 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 7,040 ( $< 10$ ). Oleh karena variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang

lain, dengan menggunakan metode *Glejser*. Agar model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas, maka nilai signifikansi variabel bebas terhadap absolute residual harus lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 5.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,342	0,465			5,038	0,000
	PAD	-1,1E-012	0,000	-0,203		-0,708	0,483
	DAU	7,06E-024	0,000	0,419		1,244	0,220
	DBH	-1,0E-011	0,000	-0,283		-0,956	0,345
	PDRB	-1,2E-007	0,000	-0,151		-0,396	0,694

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap nilai *absolute* residual berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji kelayakan model regresi berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil seperti terlihat pada gambar 6. Berdasarkan Tabel ini dapat diketahui *P-value* = 0,001 signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berganda penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Model Fit**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	270,641	4	67,660	11,807	0,000a
	Residual	240,685	42	5,731		
	Total	511,326	46			

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui koefisien determinasi dengan parameter Adj.  $R^2 = 48,4\%$ . Ini berarti variabel independen PAD, DAU dan DBH mampu menjelaskan perubahan variabel dependen IPM sebesar 48,4%, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

**Tabel 7.**  
**Hasil Adjusted R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,728 <sup>a</sup>	0,529	0,484	2,39386

Sumber: Data Diolah, 2015

Uji hipotesis penelitian (Uji t) pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dan variabel moderasi secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji hipotesis penelitian (Uji t) dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi *P-Value* pada Tabel 8 dengan  $\alpha = 0,05$ .

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68,174	1,480		0,000	
	PAD	-2,2E-012	0,000	-0,172	0,351	Ditolak
	DAU	-9,3E-014	0,000	-0,003	0,982	Ditolak
	DBH	1,39E-011	0,000	0,160	0,498	Ditolak
	PDRB	1,41E-006	0,000	0,714	0,015	Diterima

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa *P-value* pengaruh PAD pada IPM adalah sebesar 0,351 yang lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Berarti PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ini berarti hasil pengujian hipotesis ini menolak hipotesis H1 yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada IPM.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa *P-value* pengaruh DAU pada IPM adalah sebesar 0,982 yang lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Berarti DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Ini berarti hasil pengujian hipotesis ini menolak hipotesis H2 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa *P-value* pengaruh DBH pada IPM adalah sebesar 0,498 yang lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Berarti DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Ini berarti hasil pengujian hipotesis ini menolak hipotesis H3 yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada IPM.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa *P-value* pengaruh PED pada IPM adalah sebesar 0,15 yang lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Berarti PED berpengaruh positif dan signifikan. Ini berarti hasil pengujian hipotesis ini menerima hipotesis H4 yang menyatakan bahwa PED berpengaruh positif dan signifikan pada IPM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Hasil ini menolak H1 dimana PAD berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Peningkatan jumlah PAD di Kab/Kota terus meningkat dari tahun ke tahun, namun kondisi ini kemungkinan terjadi karena PAD tersebut di alokasikan sebagian besar untuk belanja pegawai yang mengakibatkan sedikitnya ketersediaan dana yang digunakan untuk peningkatan pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Hasil ini menolak H2 dimana DAU berpengaruh positif dan signifikan pada IPM.

Kondisi ini diduga, diterimanya DAU oleh pemerintah daerah berarti daerah memiliki dana tambahan yang dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur tetapi tidak cukup besar. Hal ini dikarenakan dalam formulasi DAU, komponen alokasi dasar masih menjadi komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai sehingga peningkatan DAU justru menyebabkan penurunan IPM karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harahap (2010) yang menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata DBH berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada IPM. Hasil ini menolak H3 dimana DBH berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena kecilnya proporsi DBH terhadap pendapatan daerah yang mengakibatkan peran DBH dalam mendukung belanja daerah juga sangat kecil, apalagi untuk mendukung program yang berkaitan dengan upaya peningkatan IPM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2010) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh pada IPM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ternyata PED berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Hasil penelitian ini menerima H4 dimana PED berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 1997). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum berpengaruh negative dan tidak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Bali. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

pada Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Indeks Pembangunan manusia di Kab/Kota Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memastikan bahwa alokasi PAD lebih diprioritaskan pada upaya peningkatan IPM, agar peningkatan PAD tersebut tidak kontradiktif dengan upaya peningkatan IPM. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menetapkan persyaratan bagi alokasi DAU yg diterima Kabupaten/Kota agar DAU dapat berperan dalam peningkatan IPM. Misalnya, penetapan persentase tertentu yg harus dialokasikan untuk program - program yang dapat meningkatkan IPM. Belanja pegawai Kabupaten/Kota di Bali rata - rata menyerap 92,66% PAD dan DAU oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan dua hal yaitu (1) Kebijakan moratorium pengangkatan PNS selain tenaga guru/dosen dan kesehatan merupakan kebijakan yg tepat dan tetap untuk dilanjutkan. Karena disatu sisi belanja pegawai telah mengkonsumsi lebih dari rata - rata PAD dan DAU Kab/Kota di Bali, di sisi lain peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dan guru masih sangat diperlukan untuk meningkatkan IPM. (2) Kedepannya pemerintah perlu memperhatikan/memastikan bahwa alokasi PAD maupun DAU cukup memadai untuk program yg menunjang peningkatan IPM.

## REFERENSI

- Andaiyani. 2009. Pengaruh Indeks Pertumbuhan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Jumadi., M. Pudjiharjo., Ghozali Maski., Moh. Khusaini. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science*. Vol. 13, Issue 1, pp 01-07.
- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Pamudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor*.
- Rahyuda. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana-Press.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.10, No.1, hal 103-124.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Pretasi* . Juni 2012. Vol.9, No. 1, ISSN 1441-1497.

- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta.
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Utama, Suyana.2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Wahyu, Adita. 2013. Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Silpa Pada Indeks Pembangunan Manusia Daerah/Kabupaten Kota Provinsi Bali
- Wertianti, I G A Gede. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.